

Sekilas Tentang Masalah S.A.R.A.

Askarningsih Dwianasari

Di Indonesia kewaspadaan terhadap masalah-masalah atau konflik antar etnik dirangkul dalam akronim S.A.R.A. singkatan dari Suku, Agama, Ras, Antar golongan.

Menghadapi berbagai kasus S.A.R.A. di tanah air, baik yang pernah terjadi, atau yang sedang terjadi maupun yang berpotensi akan terjadi, amatlah urgen bagi kita (terutama aparat keamanan) untuk lebih mempelajari dan melakukan kajian mendalam (*depth analysis*) yang berkesinambungan tentang etnik, khususnya yang menyangkut konflik-konflik politik dan sosial ekonomi yang sering menggunakan "bendera dan isu S.A.R.A."

Sebagaimana kita ketahui hubungan antar etnik dalam masyarakat majemuk bisa bersifat prasangka, stereotip, persaingan, konflik, diskriminasi, saling benci, intoleransi, kekerasan, damai dan sebagainya.

Republik Indonesia mengakui adanya ke-majemukan etnik, dan hal ini tampak da-

lam lambang negara "BHINNEKA TUNGGAL IKA" dan juga dalam penjelasan Pasal 18 dan 32 Undang-undang Dasar 1945 tentang penegasan, yang secara substansial bermakna diakuiinya eksistensi etnik ini.

Hal ini sejalan dengan konsep nasion (bangsa) oleh *founding fathers* kita bahwa suatu bangsa (khusus bangsa Indonesia) tidak harus memenuhi syarat adanya: persamaan bahasa, persamaan agama, persamaan keturunan, persamaan warna kulit dan sebagainya (tidak harus adanya persamaan S.A.R.A.).

Selain itu berbagai masalah atau konflik etnik ternyata bersifat universal dan ada pada setiap negara serta sewaktu-waktu bisa "meledak" atau sementara "mengendap" dan "membara" di bawah permukaan.

Beberapa contoh mengenai konflik etnik di dunia antara lain:

Di Amerika Serikat, ada gerakan *Ku Klux Klan* kulit putih, yang memusuhi the *Black*

Americans, serta gerakan *neo Nazi* dan *anti Semitisme* yang memusuhi *orang Yahudi*. Mafia Italia di negeri itu, memusuhi *gang Cina dan Vietnam*.

Di Inggris, pertentangan antara orang *Irlandia Protestan* melawan orang *Irlandia Katolik*, serta kebencian yang terpendam *warganegara Inggris berkulit putih* terhadap *warganegara Inggris asal Italia, Pakistan* serta *Hindia Barat*.

Di bekas Uni Soviet, permusuhan terpendam di antara Republik-republik etnik, seperti antara *Armenia* dan *Azerbaijan*.

Juga di Republik Yugoslavia, antara etnik *Serbia* dan *Kroatia*. Di Sri Lanka, permusuhan antara etnik *Sinhala* dengan *Tamil*. Di Myanmar, kasus-kasus konflik berbagai etnik minoritas. Di Filipina, perlawanan *Bangsa Moro*.

Sedangkan di Indonesia sampai sekarang pun masih terjadi benturan-benturan antar etnik. Di daerah Lampung (tempat terjadinya konflik etnik di bulan lalu) terdapat beragam etnik, yaitu sebut saja suku Semendo, Batak, Bali, Tionghoa, Melayu, Banten, Madura, Sunda, padang, Jawa, Bugis, Flores.

Dengan demikian kemajemukan etnik serta berbagai perbedaan yang ada bisa merupakan kemungkinan ancaman serius terhadap integritas nasional atau fragmen-

tasi politik menjadi satuan-satuan "**daerah etnik**" yang ingin memisahkan diri atau mendirikan negara nasional baru, atau secara ekstrim bergabung dengan negara lain. Hal ini perlu tetap diwaspadai.

Selain itu dari berbagai studi tentang konflik etnik (baik konflik vertikal maupun horizontal) yang terkait dengan integrasi dan stabilisasi nasional (di Indonesia) umumnya terjadi karena:

- Faktor primordial kesukuan
- Rivalitas perebutan akses ekonomi yang didasari etnik
- Rivalitas perebutan kekuasaan politik antar elite politik dengan menggunakan isu S.A.R.A. (misal dalam PILKADA, penempatan jabatan-jabata strategis)
- Kebijakan negara yang keliru, yang salah dan kurang cerdas dalam mengelola hubungan keragaman S.A.R.A. dalam masyarakat
- Akibat terpuruknya faham, rasa dan semangat kebangsaan yang tidak dibina secara baik oleh para pemimpin / elite nasional dan daerah.
- Tidak tersentuhnya lagi golongan-golongan masyarakat (S.A.R.A.) oleh makna dan solidaritas kebangsaan.

Berdasarkan pengalaman sejarah Indonesia memang ada golongan-golongan masyarakat yang pernah dieksploitasi, merasa terasing, diperlakukan tidak adil (HAM), aspirasi mereka tidak tersalurkan, kepentingan tidak tertampung, adanya ke-

senjangan sosial, diskriminasi, kemiskinan, hukum/kebiasaan adat dihapus, termasuk tanah ulayat, juga adanya konflik agama. Hal ini sangat rawan dan berbahaya apabila tidak ditangani secara baik dan profesional. Maka tidaklah heran apabila berbagai konflik politik dan sosial ekonomi yang terkait etnik pasti memunculkan "bendera S.A.R.A."

Namun patut dicatat bahwa etnisitas bukan hanya sebagai sumber konflik, karena setiap etnik di Indonesia (ada 761 etnik) memiliki juga potensi-potensi khas positif yang dapat disumbangkan bagi integritas bangsa dan pembangunan nasional. Sebagai contoh: Ada potensi/keahlian etnik di bidang pertanian, di bidang musik, olah raga, kelautan, militer.

Selain itu setiap etnik memiliki sistem nilai, tradisi, adat-istiadat sebagai landasan bagi pengembangan budaya nasional.

Ilustrasi tambahan di bawah ini adalah contoh tentang beberapa potensi etnik kita:

Etnik Aceh terkenal dengan semangat perang rakyat semestanya menentang kolonial Belanda, yang baru dapat menundukkan daerah itu setelah berperang selama 30 tahun. Selama perang kemerdekaan 1945-1949, daerah ini sama sekali tidak dapat dimasuki Belanda. Selama perang kemerdekaan etnik ini memberikan sumbangan kepada Republik, antara

lain pembelian sebuah pesawat terbang Dakota DC-3, yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesian Airways. Penduduk daerah ini juga merupakan penduduk yang amat taat kepada agamanya, sehingga dengan demikian dapat diharapkan cukup responsif terhadap himbauan keagamaan yang disampaikan para pemimpin Republik.

Etnik Ambon terkenal dengan toleransi agamanya yang tinggi, sesuai dengan adat pela. Letnan Jenderal Tjokropranolo (pernah) mengisahkan kebijaksanaan keamanan yang beliau anut sebagai Komandan Corps Polisi Militer di daerah operasi Ambon. Setelah mengenal benar-benar watak orang Ambon, yang ternyata teguh dengan janji yang telah diucapkannya, Tjokropranolo membebaskan para tahanan operasi, dengan keyakinan penuh mereka tidak akan memberontak lagi.

Etnik Batak terkenal berbicara secara logis dan lugas, berdisiplin dan mempunyai bakat dalam berorganisasi, seni dan pendidikan. Banyak etnik Batak bekerja dalam jajaran militer dan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, pendidikan serta penyanyi dan pencipta lagu terkenal.

Etnik Jawa terkenal sebagai petani dan pekerja yang rajin dan sopan, dan penggemar kisah-kisah wayang yang penuh dengan filsafat yang berharga. Kesenian keraton Jawa telah sering mewakili Republik Indo-

nesia dalam forum internasional.

Etnik Bugis terkenal sebagai perantau dan pelaut yang piawai dan berani. Prestasi paling akhir adalah menakhodai dan mengawaki perahu *Amanna Gappa*, dari Sulawesi Selatan ke Pulau Madagaskar, yang ribuan mil laut jauhnya. Etnik Bugis ini terdapat hampir di seluruh pesisir Indonesia dan Malaysia.

Dalam kaitan ini perlu diakui bahwa kolonial Belanda sangat memahami, mendalami dan menguasai pengetahuan tentang etnisitas (S.A.R.A.) nusantara sehingga Belanda berhasil menggunakannya secara efektif sebagai sarana pemecah belah bangsa kita serta mampu menyatukan Indonesia secara administratif demi kepentingan kolonialismenya.

Oleh karena itu keragaman etnik bangsa kita (S.A.R.A.) perlu dan harus dipelajari, disosialisasikan, serta difahami dan dipraktikkan sejak dini di sekolah-sekolah dasar sampai ke perguruan-perguruan tinggi, akademi, sekolah-sekolah kedisiplinan sipil/militer/polisi/swasta dan tentu peran serta mass media. Selain itu, rasa, faham dan semangat kebangsaan perlu terus dipupuk bukan dengan pola/cara indoktrinasi.

Dengan demikian maka dalam berbagai perencanaan maupun kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan tingkat daerah

perlu memperhatikan aspek-aspek etnik ini. Sebagai konsekuensinya maka sekecil apapun suatu etnik di wilayah PEMDA/PU-SAT hendaknya secara adil perlu terwakili di dalam struktur politik, ekonomi dan budaya. Tentu para ahli antropologi, sosiologi dan budayawan dapat menyumbangkan pemikiran serta keahliannya. Termasuk juga jabatan-jabatan di berbagai departemen pemerintah dan swasta.

Pada kesempatan ini penulis mengutip sebagian isi pidato kenegaraan Presiden Soeharto (15 Agustus 1974) sebagai berikut:

"...Masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang serba ganda. Kita terdiri dari bermacam-macam suku, kita memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, kita masing-masing mempunyai adat istiadat kedaerahan yang berbeda-beda, karena kulit dan rambut kita pun tidak semuanya sama, kita menganut agama yang berlain-lainan, kita mendiami kepulauan besar kecil yang tidak terbilang jumlahnya di Satu Tanah Air yang luas dan indah ini.

Kita menyadari perbedaan-perbedaan itu. Akan tetapi jauh di atasnya kita lebih menyadari kebulatan tekad kita untuk bersatu padu sebagai Bangsa Indonesia..."

Selanjutnya Bapak Harry Tjan Silalahi menekankan bahwa tanpa adanya rasa kesaa-

darannya menjadi suatu bangsa dengan identitas nasional maka kepaduan sosial (kohesi) akan dikalahkan oleh unsur-unsur keanekaagaman atau kemajemukan yang didasari atas ego.

Akibatnya yang timbul dari masyarakat yang egois seperti itu, akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berpikiran sempit dan massa publik yang mudah dihasut. Lebih lanjut yang tumbuh subur adalah rasa saling curiga dan kedengkian terhadap kelompok lain, kebrutalan di kalangan masyarakat, kepentingan golongan dan kelompok menjadi dominan dan hasilnya adalah kemiskinan dan disintegrasi bangsa.

Selanjutnya Bapak Emil Salim dalam satu papernya menekankan:

"...Dalam bangsa yang majemuk, seperti Indonesia ini, ruang hidup harus diberikan kepada semua suku, agama, ras dan golongan untuk mengembangkan rasa sekuritas, identitas, kemajuan diri dan perlakuan adil agar kelompok S.A.R.A. ini tidak merasa terancam oleh kelompok lain. Khususnya kelompok minoritas harus merasakan kehadiran suasana akrab (*intimacy*) di tengah-tengah kelompok mayoritas sehingga kerasan tinggal hidup dalam keluarga besar bangsa Indonesia ini.

Usaha konkret yang menunjang "rasa ikut memiliki Indonesia yang bermasyarakat plural" itu harus dikembangkan dalam wu-

jud kegiatan lintas suku, lintas agama, lintas ras dan lintas golongan. Simbol-simbol pengakuan atas kehadiran kebhinnekaan bangsa perlu dikembangkan...."

Kemudian, menurut DR Saafudin Bahar, sesungguhnya akar masalah S.A.R.A. bukanlah terletak pada adanya kemajemukan suku, agama, ras dan antar golongan, tetapi pada kesamaan dan kenyataan adanya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya nasional kepada golongan-golongan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan yang lebih konsisten dari kebijakan pemerataan adalah merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian yang lebih baik daripada terlalu menitikberatkan pada aspek *security* saja.

Selanjutnya etnik tidak hanya merupakan risiko keamanan tetapi dapat juga menjadi potensi konstruktif bagi ketahanan nasional. Penggunaan potensi suku, agama, ras, antar golongan untuk pemantapan dan peningkatan ketahanan nasional perlu dirancang secara lebih sistemik dan komprehensif. Di sinilah letak kunci, seni dan kecerdasan kepemimpinan/elite nasional dalam mengelola kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam hubungan ini, menurut pendapat penulis para elite kita perlu memahami dan terus melestarikan filosofi dan adat istiadat setiap etnik nusantara yang mampu menyelesaikan konflik-konflik mereka secara

damai, melalui pemimpin yang bukan ber-label politik.

Kesimpulan

1. Indonesia menganut strategi Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui kemajemukan bangsa kita secara etnik dan memandang kemajemukan itu sebagai kekayaan budaya.
2. Kemajemukan etnik (S.A.R.A.) serta aneka perbedaan yang lain memang merupakan kekayaan bangsa tetapi sekaligus merupakan potensi ancaman terutama terhadap integrasi nasional.
3. Ruang hidup harus diberikan kepada semua suku, agama, ras dan golongan untuk mengembangkan rasa sekuritas identitas, kemajuan diri dan perlakuan yang adil demi menghindari konflik.

Saran

- Kepemimpinan para elite tingkat pusat dan daerah harus memahami benar berbagai potensi S.A.R.A. dan mampu memanfaatkannya bagi peningkatan ketahanan nasional dan ketahanan daerah tetapi bukan "memainkan" isu S.A.R.A. demi kepentingan golongan dan kelompoknya.
- Perlu kajian berlanjut tentang kewilayahan nasional yang bersifat kompre-

hensif dan integral serta pemetaanantisipasi potensi-potensi konflik S.A.R.A. di seluruh Indonesia dalam rangka kewaspadaan nasional.

- Perlu sosialisasi tentang S.A.R.A. yang dilaksanakan secara sistemik, komprehensif dan berlanjut melalui berbagai sarana komunikasi terkini dengan pendekatan paradigma yang baru sehingga konflik-konflik politik dan sosial ekonomi yang menggunakan "bendera S.A.R.A" tidak akan terulang. □

Daftar Pustaka (dan Kutipan)

- Anatomi Konflik Politik di Indonesia - DR. Imam Tolkhah, M.LET
- Integrasi Komponen Bangsa Menuju Stabilitas Nasional - Alex Dinuth, Lemhannas, 2007
- Masalah etnik dalam proses Integrasi Nasional - DR Saafrudin Bahar (Persepsi Lemhannas)
- Menuju Integrasi Bangsa Indonesia Masa Depan - DR Soerjanto Poespowardoyo (Sejarah - MSi & Arsip Nasional)
- Membangun Integrasi Bangsa - DR Emil Salim (Sejarah - MSi & Arsip Nasional)
- Nasionalisme & Strategi KAMNAS-Harry Tjan Silalahi (Perspektif baru KAMNAS)
- Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer - Novri Susan, MA